

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Estimasi regresi linear menghasilkan nilai koefisien PAD sebesar 0.383673.
2. DAU berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Estimasi regresi linear menghasilkan nilai koefisien DAU sebesar - 0.000908, itu berarti DAU tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal, karena pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki belanja modal yang besar, pemerintah daerah lebih cenderung menggunakan DAU untuk belanja yang lain, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja lainnya.
3. DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Estimasi regresi linear menghasilkan nilai koefisien DAK sebesar 0.492592.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan dan berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perluasan data penelitian meliputi perluasan wilayah penelitian maupun perluasan rentang waktu penelitian. dan dalam penelitian berikutnya diperlukan analisis pengaruh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini, seperti Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi, dan sisa lebih perhitungan anggaran.
2. Pemerintah daerah diharapkan untuk terus meningkatkan penerimaan PAD dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan PAD serta mengali potensi-potensi PAD yang ada di daerah. Adanya peningkatan penerimaan PAD tersebut diharapkan dapat meningkatkan porsi Belanja Modal yang di anggarkan, hal ini cukup penting mengingat PAD merupakan indikator kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan.
3. Perhitungan DAU sebaiknya diubah agar tidak lagi menggunakan alokasi belanja pegawai sebagai dasar perhitungan. hal ini diharapkan akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus pada belanja modal yang bersifat produktif.
4. Nilai DAK yang diserahkan ke daerah agar lebih ditingkatkan mengingat sifat penyerahannya sebagai specific purpose grant yang mengharuskan penggunaannya hanya untuk membiayai Belanja Modal.